

PERSEPSI

RABU, 4 MARET | TAHUN 2020

Memaknai Perkembangan Ekonomi Kabupaten Gorontalo

TULISAN ini merupakan refleksi empat tahun kepemimpinan Bupati Gorontalo (Nelson Pomalingo), fokus refleksinya di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Secara spasial, Kabupaten Gorontalo potensinya lebih besar dibandingkan dengan lima kabupaten/kota. Kabupaten induk ini memiliki luas wilayah yang kedua setelah Pohuwato dengan jumlah penduduk hampir 400 ribu, memiliki desa paling banyak yakni 191. Jumlah populasi yang besar merupakan potensi pendorong agregat permintaan untuk meningkatkan produksi, populasi tinggi juga membuka peluang meningkatkan produktivitas human capital. Apalagi ditunjang wilayah perdesaan yang banyak memudahkan pemberian layanan lebih efektif bagi masyarakat untuk menghasilkan output ekonomi. Disamping itu, dengan jumlah desa paling banyak pembagian Dana Desa pun lebih besar, di tahun 2019 Dana Desa yang dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo mencapai Rp. 213.867 miliar, artinya uang sebanyak itu berputar di desa untuk mengakselerasi pembangunan. Potensi lainnya yang dipunyai oleh Kabupaten Gorontalo, yakni jumlah industri lebih banyak, penghasil tanaman pangan utama di Provinsi Gorontalo, jumlah ternak, tanaman keras lainnya pun populasinya lebih besar dibanding kabupaten lainnya.

Potensi-potensi itu menjadi modal untuk mendorong perekonomian, namun demikian periode tahun 2015 - 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo trendnya mengalami penurunan tetapi Kabupaten Gorontalo tidak sendirian, karena nyatanya dilevel provinsi mengalami

yang dapat dicatat, antara lain; 1) Secara nasional pertumbuhan ekonominya juga terus tertekan sebagai dampak dari kinerja ekspor yang melemah. Harga komoditas di pasar internasional mengalami kelesuan, sehingga tidak dapat dioptimalkan penjualan komoditas di luar negeri. 2) Sebagai daerah yang mengandalkan komoditas pertanian, ia bergantung pada keadaan iklim, sepanjang tahun anomali cuaca kerap terjadi.

Melemahnya pertumbuhan ekonomi tidak serta merta mempengaruhi penurunan indikator makro ekonomi lainnya maupun indikator kesejahteraan, sebab pada kenyataannya angka kemiskinan terus menurun, tingkat pengangguran rendah demikian pula gini ratio yang terus menyempit. Jika dikorelasikan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo dengan kemiskinan, pengangguran dan gini ratio nampak mengalami trade off. Maknanya bahwa sekalipun pertumbuhan ekonomi turun di bawah rata-rata 7 persen dibanding periode sebelumnya, tetapi kualitas pertumbuhan makin bagus (inklusif). Tentu saja yang ideal adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi elastisitasnya terhadap penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan gini ratio nilainya besar. Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen dan Jean-Paul Fitoussi (2009) telah mengingatkan bahwa PDB/PDRB (output ekonomi) bukan tolak ukur yang tepat mengukur kemajuan ekonomi. Menjadi percuma saja output (pertumbuhan) ekonomi yang tinggi namun tidak memberikan efek terhadap penurunan kemiskinan, menekan angka pengangguran atau memperbaiki ketimpangan.

Tujuan pembangunan secara hakiki tidak semata

OLEH

Muh. Amler Arham

sedikit (full employment) dan ketimpangan yang rendah. Bagi negara yang telah mapan, demikian juga daerah yang makin inklusif pertumbuhannya angka yang tinggi bukan lagi menjadi patokan yang pas menggambarkan kemajuan. Saat ini justru paling penting dilihat adalah produktivitas setiap sektor dan tenaga kerjanya. Oleh sebab itu angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo yang melambat bukan gambaran kinerja buruk.

Mungkin menjadi pertanyaan, mengapa pertumbuhan melambat namun kemiskinan tetap menurun? Demikian halnya angka pengangguran makin kecil. Ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo makin inklusif, sektor pendorong pertumbuhan memberikan efek lebih merata. Selain itu makin berkembangnya under ground economy dalam hal ini sektor informal, malahan sektor ini memiliki peranan signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pekerja di sektor informal dapat dilihat dari status pekerjaan masyarakat, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga yang tak dibayar, jumlahnya lebih dari separuh dari penduduk yang bekerja. Hanya saja under ground economy ini tidak tercatat dalam PDRB, sehingga naik-turunnya pertumbuhan ekonomi tidak in-line dengan masalah kemiskinan, ia lebih berdampak terhadap angka pengangguran. Itulah sebabnya pertumbuhan ekonomi yang melambat tidak terlalu memberikan efek terhadap kemiskinan.

Sektor informal

dengan kekumuhan dan ketidakberaturan. Under ground economy pun secara umum kurang berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tapi setidaknya dapat menolong pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja. Disinilah pentingnya pemerintah hadir melakukan edukasi, penataan dan mendorong mereka naik kelas. Dengan begitu status pekerjaan mereka meningkat ke sektor formal yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kemungkinan lain trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan karena peranan Dana Desa. Angka kemiskinan perdesaan penurunannya lebih cepat, tapi tentu saja ini baru sebatas hipotesa membutuhkan pembuktian secara empiris, apakah betul Dana Desa signifikan menurunkan angka kemiskinan perdesaan.

Bidang lain yang menjadi bahan refleksi adalah peningkatan mutu manusia yang diukur dari IPM, kurun waktu empat tahun IPM Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan. Meskipun masih butuh percepatan dengan memperbaiki komponen pendidikan, kesehatan dan pendapatan, sebab IPM Kabupaten Gorontalo masih lebih rendah dibanding dengan Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini menempatkan peningkatan mutu SDM sebagai program prioritas, diharapkan program tersebut dapat memperbaiki komponen rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gorontalo masih di bawah 7 tahun, itu artinya masih banyak penduduk Kabupaten Gorontalo mengakses pendidikan hanya pada level sekolah dasar. Diperlukan kebijakan afirmatif untuk memberikan kesadaran bagi orang tua murid untuk

tingkat pendidikan. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikan ditingkat sekolah menengah karena ada program pendidikan gratis.

Persoalan lain yang perlu dievaluasi di Kabupaten Gorontalo, yakni masalah pengangguran nampak mengalami penurunan, bahkan di tahun 2018 pengangguran terbuka hanya sebesar 3,27. Angka itu sudah termasuk natural unemployment, orang menganggur bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan. Hanya saja perlu dimaknai lebih dalam, angka pengangguran yang rendah belum tentu dapat memperbaiki persoalan kemiskinan. Kondisi inilah yang dialami oleh daerah-daerah di Provinsi Gorontalo, pengangguran terbuka nampak begitu rendah tetapi angka kemiskinan masih double digit, hal ini diakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Secara sederhana produktivitas tenaga kerja dapat dihitung dengan membandingkan antara input produksi tenaga kerja dan output produksi PDRB. Hasil perhitungan yang kami lakukan, produktivitas tenaga kerja Kabupaten Gorontalo masih lebih rendah dari Kabupaten Gorontalo Utara, Bone Bolango dan Boalemo, tetapi lebih baik daripada Pohuwato dan Kota Gorontalo. Terlepas dari itu semua, bahwa Kabupaten Gorontalo tantangannya begitu banyak. Kabupaten induk ini memiliki kelebihan, diantaranya nilai PDRB paling tinggi se Provinsi Gorontalo, memiliki kontribusi paling besar terhadap pembentukan ekonomi provinsi mencapai 31,22 persen. Ini jelas menjadi pembeda dengan provinsi lainnya, pada umumnya provinsi di luar Gorontalo ibukota provinsi menjadi penyumbang ekonominya.

Memaknai Perkembangan Ekonomi Kabupaten Gorontalo

TULISAN ini merupakan refleksi empat tahun kepemimpinan Bupati Gorontalo (Nelson Pomalingo), fokus refleksinya di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Secara spasial, Kabupaten Gorontalo potensinya lebih besar dibandingkan dengan lima kabupaten/kota. Kabupaten induk ini memiliki luas wilayah yang kedua setelah Pohuwato dengan jumlah penduduk hampir 400 ribu, memiliki desa paling banyak yakni 191. Jumlah populasi yang besar merupakan potensi pendorong agregat permintaan untuk meningkatkan produksi, populasi tinggi juga membuka peluang meningkatkan produktivitas human capital. Apalagi ditinjau wilayah perdesaan yang banyak memudahkan pemberian layanan lebih efektif bagi masyarakat untuk menghasilkan output ekonomi. Disamping itu, dengan jumlah desa paling banyak pembagian Dana Desa pun lebih besar, di tahun 2019 Dana Desa yang dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo mencapai Rp. 213.867 miliar, artinya uang sebanyak itu berputar di desa untuk mengakselerasi pembangunan. Potensi lainnya yang dipunyai oleh Kabupaten Gorontalo, yakni jumlah industri lebih banyak, penghasil tanaman pangan utama di Provinsi Gorontalo, jumlah ternak, tanaman keras lainnya pun populasinya lebih besar dibanding kabupaten lainnya.

Potensi-potensi itu menjadi modal untuk mendorong perekonomian, namun demikian periode tahun 2015 - 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo trendnya mengalami penurunan, tetapi Kabupaten Gorontalo tidak sendirian, karena nyatanya di level provinsi mengalami kondisi serupa demikian pula adanya di daerah-daerah lain. Penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi setidaknya ada dua

yang dapat dicatat, antara lain; 1) Secara nasional pertumbuhan ekonominya juga terus tertekan sebagai dampak dari kinerja ekspor yang melemah. Harga komoditas di pasar internasional mengalami kelesuan, sehingga tidak dapat dioptimalkan penjualan komoditas di luar negeri. 2) Sebagai daerah yang mengandalkan komoditas pertanian, ia bergantung pada keadaan iklim, sepanjang tahun anomali cuaca kerap terjadi.

Melemahnya pertumbuhan ekonomi tidak serta merta mempengaruhi penurunan indikator makro ekonomi lainnya maupun indikator kesejahteraan, sebab pada kenyataannya angka kemiskinan terus menurun, tingkat pengangguran rendah demikian pula gini ratio yang terus menyempit. Jika dikorelasikan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo dengan kemiskinan, pengangguran dan gini ratio nampak mengalami trade off. Maksudnya bahwa sekalipun pertumbuhan ekonomi turun di bawah rata-rata 7 persen dibanding periode sebelumnya, tetapi kualitas pertumbuhan makin bagus (inklusif). Tentu saja yang ideal adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi elastisitasnya terhadap penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan gini ratio nilainya besar. Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen dan Jean-Paul Fitoussi (2009) telah mengingatkan bahwa PDB/PDRB (output ekonomi) bukan tolak ukur yang tepat mengukur kemajuan ekonomi. Menjadi percuma saja output (pertumbuhan) ekonomi yang tinggi namun tidak memberikan efek terhadap penurunan kemiskinan, menekan angka pengangguran atau memperbaiki ketimpangan.

Tujuan pembangunan secara hakiki tidak semata diukur dari tingginya pertumbuhan, tapi tujuan akhirnya adalah kemiskinan rendah (zero poverty), angka pengangguran

OLEH

Muh. Amier Arham

sedikit (full employment) dan ketimpangan yang rendah. Bagi negara yang telah mapan, demikian juga daerah yang makin inklusif pertumbuhannya angka yang tinggi bukan lagi menjadi patokan yang pas menggambarkan kemajuan. Saat ini justru paling penting dilihat adalah produktivitas setiap sektor dan tenaga kerjanya. Oleh sebab itu angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo yang melambat bukan gambaran kinerja buruk.

Mungkin menjadi pertanyaan, mengapa pertumbuhan melambat namun kemiskinan tetap menurun? Demikian halnya angka pengangguran makin kecil. Ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo makin inklusif, sektor pendorong pertumbuhan memberikan efek lebih merata. Selain itu makin berkembangnya under ground economy dalam hal ini sektor informal, malahan sektor ini memiliki peranan signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pekerja di sektor informal dapat dilihat dari status pekerjaan masyarakat, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga yang tak dibayar, jumlahnya lebih dari separuh dari penduduk yang bekerja. Hanya saja under ground economy ini tidak tercatat dalam PDRB, sehingga naik-turunnya pertumbuhan ekonomi tidak in-line dengan masalah kemiskinan, ia lebih berdampak terhadap angka pengangguran. Itulah sebabnya pertumbuhan ekonomi yang melambat tidak terlalu memberikan efek terhadap kemiskinan.

Sektor informal memberikan kontribusi penting terhadap penyerapan tenaga kerja, persoalannya mereka ini kerap diidentikkan

dengan kekumuhan dan ketidakberaturan. Under ground economy pun secara umum kurang berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tapi setidaknya dapat menolong pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja. Disinilah pentingnya pemerintah hadir melakukan edukasi, penataan dan mendorong mereka naik kelas. Dengan begitu status pekerjaan mereka meningkat ke sektor formal yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kemungkinan lain trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan karena peranan Dana Desa. Angka kemiskinan perdesaan penurunannya lebih cepat, tapi tentu saja ini baru sebatas hipotesa membutuhkan pembuktian secara empiris, apakah betul Dana Desa signifikan menurunkan angka kemiskinan perdesaan.

Bidang lain yang menjadi bahan refleksi adalah peningkatan mutu manusia yang diukur dari IPM, kurun waktu empat tahun IPM Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan. Meskipun masih butuh percepatan dengan memperbaiki komponen pendidikan, kesehatan dan pendapatan, sebab IPM Kabupaten Gorontalo masih lebih rendah dibanding dengan Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini menempatkan peningkatan mutu SDM sebagai program prioritas, diharapkan program tersebut dapat memperbaiki komponen rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gorontalo masih di bawah 7 tahun, itu artinya masih banyak penduduk Kabupaten Gorontalo mengakses pendidikan hanya pada level sekolah dasar. Diperlukan kebijakan afirmatif untuk memberikan penyadaran bagi orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya, bila perlu memberikan tindakan bagi orang tua yang tidak mendorong anaknya melanjutkan

tingkat pendidikan. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikan ditingkat sekolah menengah karena ada program pendidikan gratis.

Persoalan lain yang perlu dievaluasi di Kabupaten Gorontalo, yakni masalah pengangguran nampak mengalami penurunan, bahkan di tahun 2018 pengangguran terbuka hanya sebesar 3,27. Angka itu sudah termasuk natural unemployment, orang menganggur bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan. Hanya saja perlu dimaknai lebih dalam, angka pengangguran yang rendah belum tentu dapat memperbaiki persoalan kemiskinan. Kondisi inilah yang dialami oleh daerah-daerah di Provinsi Gorontalo, pengangguran terbuka nampak begitu rendah tetapi angka kemiskinan masih double digit, hal ini diakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Secara sederhana produktivitas tenaga kerja dapat dihitung dengan membandingkan antara input produksi tenaga kerja dan output produksi PDRB. Hasil perhitungan yang kami lakukan, produktivitas tenaga kerja Kabupaten Gorontalo masih lebih rendah dari Kabupaten Gorontalo Utara, Bone Bolango dan Boalemo, tetapi lebih baik daripada Pohuwato dan Kota Gorontalo. Terlepas dari itu semua, bahwa Kabupaten Gorontalo tantangannya begitu banyak. Kabupaten induk ini memiliki kelebihan, diantaranya nilai PDRB paling tinggi se Provinsi Gorontalo, memiliki kontribusi paling besar terhadap pembentukan ekonomi provinsi mencapai 31,22 persen. Ini jelas menjadi pembeda dengan provinsi lainnya, pada umumnya provinsi di luar Gorontalo ibukota provinsi menjadi penyumbang ekonomi utama.

Penulis adalah Dekan Fakultas Ekonomi UNG